

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Pendidikan	1.1	DINAS PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
			1	PENDIDIKAN	1				
			1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	100 %			
			1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	100 %			
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	3 Dok		1 perjalanan dinas biasa tidak di realisasikan karena tidak ada jadwal untuk pelaksanaan perjalanan dinas, belanja makan minum kegiatan perencanaan sudah dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan dan masih ada sisa yang tidak dilaksanakan (Silpa DPA)	1
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	8 Dok		1 Makan Minum rapat yang tidak direalisasikan karena sudah tidak ada jadwal kegiatan (silpa DPA)	
			3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	4 Kali		1 sebagian honor tim bos yang tidak direalisasikan karena hanya dibayarkan 2 bulan saja (dianggarkan di abt) tidak bisa 12 bulan, sebagian sisa makan minum rapat dan kegiatan karena sudah tidak ada jadwal lagi (silpa DPA)	
			2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	100 %			
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	14 Bulan			
			2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	1514 Org			
			3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	12 Bulan			
			3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3	100 %			
			1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	5 Laporan			
			4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	100 %			
			1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	170 Set			
			2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	1 Kegiatan			
			3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	15 Kasus		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Anggaran Rp30.000.000,00 dengan rincian Belanja Pegawai Rp. - , Barang dan Jasa Rp30.000.000,00 Total Serapan : Rp 7.458.100,00 Sisa Anggaran Rp 22.541.900,00 dengan rincian :	
								1 Belanja BBM dapat dilaksanakan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam rangka menyelesaikan masalah pegawai yang melanggar disiplin	
								2 Terdapat Belanja ATK, Cetak, dan Benda Pos sesuai dengan speck yang harganya dibawah harga standar dalam SIPD	

										3	Belanja honor tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya pegawai yang melanggar disiplin tingkat berat sehingga Tim Pemeriksa yang ditetapkan dengan SK Bupati/Sekda tidak dapat dibentuk		
										4	Terjadinya penurunan jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin		
		4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4	1 Kegiatan	74.995.900,00	4	67.305.571,00	89,75				
		5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	4 Orang	50.000.000,00	5	38.590.179,00	77,18				
		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	100 %	1.424.396.372,00	5	1.357.290.735,00	94,39				
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	16 Jenis	10.994.500,00	1	10.661.500,00	96,97				
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	54 Unit	610.282.600,00	2	597.721.100,00	97,94				
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	2 Jenis	109.282.000,00	3	109.128.100,00	99,86				
		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4	3 Jenis/Eks	137.999.800,00	4	137.687.000,00	99,77				
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5	3 Jenis	10.000.000,00	5	9.236.000,00	92,36				
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	100 OKBulan	350.000.000,00	6	346.105.275,00	98,89				
		7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7	12 Bulan	195.837.472,00	7	146.751.760,00	74,94	1	Pengembangan Aplikasi tidak dilaksanakan karena anggaran yang ada tidak cukup untuk pengembangan, pemeliharaan aplikasi tidak dilaksanakan karena di perubahan sehingga tidak ada waktu untuk pemeliharaan dan uji coba, Honor admin aplikasi website tidak direalisasikan karena sudah di rangkap oleh admin aplikasi lainnya (silpa DPA)	1	Perlu adanya usulan kembali ke bagian anggaran untuk menambah kebutuhan anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan usulan tersebut diupayakan bukan pada anggaran ABT
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6	100 %	1.611.996.000,00	6	1.039.787.140,00	79,35				
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	2 Unit/Motor	1.410.756.000,00	1	840.295.140,00	59,56	Belanja modal kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dengan spesifikasi double cabin (4x4) dengan nilai Rp. 480.585.000 tidak terserap anggarannya, permasalahannya adalah sebagai berikut : Adapun solusinya adalah sebagai berikut :			
										1	Produk yang akan diadakan sebagaimana yang tertuang dalam DPA harus inden selama 3 s.d 5 bulan disebabkan tidak ada unitnya yang ready.	1	Pendaan sebaiknya dilaksanakan pada anggaran murni
										2	Penganggaran pada APBD Perubahan menyebabkan tidak cukup waktu untuk pelaksanaannya.	2	Merubah Spesifikasi
												3	Menganggarkan produk dalam negeri yang banyak tersedia di pasaran
		2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	1 Unit	201.240.000,00	2	199.492.000,00	99,13				
		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	100 %	507.131.400,00	7	422.339.182,00	82,99				

		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	200 Lembar	1.989.400,00	1	999.400,00	50,24			
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	12 Bulan	458.842.000,00	2	375.039.782,00	81,74			
		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	12 Bulan	26.300.000,00	3	26.300.000,00	100			
		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	12 Bulan	20.000.000,00	4	20.000.000,00	100			
		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	100 %	749.560.600,00	8	724.558.830,00	95,63			
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	6 unit	209.993.400,00	1	189.272.630,00	90,13			
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	1 unit	515.910.000,00	2	512.229.000,00	99,29			
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	3	1 unit	23.657.200,00	3	23.057.200,00	97,46			
		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2		223.189.997.328,00	2	147.375.775.376,00	83,49			
		1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1	100 %	118.215.715.744,00	1	75.099.807.800,00	88,12			
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1	1 Sekolah	239.501.400,00	1	230.600.900,00	96,28			
		2	Penambahan Ruang Kelas Baru	2	7 Unit	6.547.168.200,00	2	5.194.140.857,00	79,33			<p>Penambahan Ruang Kelas Sekolah Baru Anggaran : Rp.6.547.168.200,00 dengan rician : Belanja Pegawai Rp. 130.921.000,00, Barang dan Jasa : Rp. 339.339.200,00, Belanja Hibah Rp.865.156.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.5.211.752.000,00, Total Serapan : Rp. 5.194.140.857,00 Pelaksanaan Kegiatan pada DPA Penambahan Ruang Kelas Baru tidak terlaksana semua karena ada 1 Kegiatan yang tidak terlaksana disamping ada kegiatan lainnya dengan adanya tender atau penawaran dalam hal ini lelang sehingga tidak terserap dananya tetapi kegiatan tetap berjalan, adapun permasalahannya sebagai berikut :</p>
												<p>1 Pihak Dinas Pendidikan Masih Menunggu Proses Pencairan Klaim dari pihak asuransi dan sesegera mungkin melakukan pengembalian dana ke Pemerintah Daerah setelah Klaim dari pihak asuransi di keluarkan.</p>
												<p>1 Untuk Pekerjaan Fisik Penambahan RKB SDN 001 Biatan Ilir (Filiat) di Semindal dengan nilai kontrak 561.902.400,00 dimana pelaksana CV.Shilya telah melakukan pengambilan uang muka senilai 168.570.720,00.Permasalahan dilokasi yang akan dibangun ternyata bermasalah terkait letak wilayah dengan perbatasan Kutai Timur dimana lokasi tersebut diakui oleh masyarakat adat melawai Kutai Timur.Sehingga didalam menyelesaikan permasalahan wilayah tersebut hingga sampai ditemukannya titik lokasi yang baru tersebut memakan waktu selama 110 hari kalender dan akhirnya dilakukan adendum waktu pekerjaan serta Pelaksana CV.Shilya diberikan waktu penyelesaian pekerjaan sampai tanggal 14 Februari 2023. Kemudian pelaksana CV. Shilya dan Konsultan Pengawas bersedia dibayar di abt 2023.Namun demikian sampai saat ini Pelaksanaan CV. Shilya tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jaabnya sehingga pihak dinas pendidikan akan melakukan pemutusan kontrak dan saat ini menjalani proses klaim jaminan asuransi (Berupa Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksana)</p>

		3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3	33	Unit	14.250.413.376,00	3	14.235.809.500,00	99,90		
		4	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	4	6	Sekolah	1.319.972.950,00	4	1.314.108.950,00	99,56		
		5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	5	7	Sekolah	5.110.697.850,00	5	4.988.437.898,00	97,61		
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	6	3	Sekolah	1.253.202.100,00	6	1.246.967.100,00	99,50		
		7	Pengadaan Mebel Sekolah	7	7	Sekolah	2.249.247.200,00	7	2.249.198.600,00	100,00		
		8	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	8	47	Sekolah	6.741.184.400,00	8	6.616.950.660,00	98,16		
		9	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	9	1192	Siswa	1.888.000.000,00	9	1.879.118.500,00	99,53		
		10	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	10	4	Sekolah	422.978.300,00	10	421.727.300,00	99,70		
		11	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	11	166	Sekolah	350.000.000,00	11	180.926.500,00	51,69	<p>Penyelenggara Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Anggaran : Rp.350.000.000,00 dengan rician : Belanja Pegawai Rp. 19.920.000,00, Barang dan Jasa :Rp. 320.080.000,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.10.000.000,00, Total Serapan : Rp. 181.476.500,00 Pelaksanaan Kegiatan pada DPA Penyelenggara Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar tetap terlaksana tuntas tetapi ada belanja yang tidak terserap dananya tapi tetap berjalan kegiatan. adapun permasalahannya adalah :</p> <p>Adapun solusinya adalah sebagai berikut :</p>	
											<p>1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Kompetisi Sains Nasional Tingkat Provinsi tidak dilaksanakan sehingga dana tidak terserap karena lembaga semula direncanakan tingkat provinsi tetapi kompetisi tingkat provinsi dilakukan secara online. dan serta perjalanan dinas dalam daerah di kegiatan ANBK dana nya tidak bisa terserap dikarenakan pelaksanaannya diakhir tahun dan sudah terinci jadwalnya dari pusat maka dari itu dananya tidak bisa maksimal terserap</p>	<p>1 Oleh Pihak Dinas Provinsi di tujukan kepada lembaga lain yang bisa melaksanakan semoga jadwal yang direncanakan ditahun selanjutnya dapat disesuaikan agar tidak ada dana yang tidak terserap.</p>
		12	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	12	237	Sekolah	150.000.000,00	12	138.442.500,00	92,30		
		13	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	13	200	Siswa	101.486.000,00	13	92.685.000,00	91,33		
		14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	14	530	Orang	1.540.000.000,00	14	1.215.799.275,00	78,95	<p>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar Anggaran : Rp1.540.000.000,00 dengan rincian : Belanja Pegawai : Rp49.500.000,00 Barang dan Jasa : Rp1.490.500.000,00 Total Serapan Rp1.215.799.275,00 Sisa Anggaran Rp324.200.725,00. Adapun permasalahannya sebagai berikut :</p> <p>Adapun solusinya adalah sebagai berikut :</p>	
											<p>1 Hanya ada 1 kontrak yaitu belanja makan minum aktifitas lapangan kegiatan Guru Penggerak</p>	<p>1 PPG tetap dilanjutkan untuk tahun selanjutnya sampai peserta yang mendaftar dapat dinyatakan lulus oleh karena ini anggaran tetap diperlukan terkait bantuan transport dan akomodasi peserta PPG terhadap guru TK,SD dan SMP selanjutnya dan standar harga yang ada dilapangan(Riil) dapat diusulkan dalam harga dalam SIPD</p>
											<p>2 Terdapat Belanja ATK, Cetak,Benda Pos dan Bahn Komputer sesuai dengan speck yang harganya dibawah harga standar dalam SIPD</p>	
											<p>3 Belanja Makan Minum dilaksanakan sesuai dengan kehadiran Riil Peserta (Undangan)</p>	

											4	Honorarium narsum dibayar berdasarkan pangkat/golongan kualifikasi pendidikan dan keahlian masing-masing narsum dan terdapat beberapa narsum yang standar honorinya dibawah harga standar dalam SIPD	2	Honor tim tetap akan dibuat seiring adanya pembinaan baik itu terhadap sekolah maupun personal di sekolah dan belanja perjalanan dinas akan tetap dilaksanakan dengan agenda monitoring dan evaluasi sesuai dengan bunyi dalam DPA agar belanja perjalanan dinas dapat terlaksana dan terakomodir.
											5	Surat Keputusan (SK) Sekda tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit tidak dapat berlaku surut akibatnya honor yang harus dibayarkan 12 bulan hanya dapat dibayarkan 3 bulan	3	Terkait dengan pengadaan barang diusulkan anggaran biaya angkut
											6	Belanja sewa gedung/hotel /penginapan hanya diperuntukan bagi peserta dari pesisir dan pedalaman	4	Surat Keputusan (SK) Tim Panitia akan diusulkan kabagian Hukum setiap bulan Desember sebelum kegiatan dilaksanakan
											7	Terdapat beberapa kegiatan yang memerlukan perjalanan dinas untuk koordinasi/konsultasi semula diluar provinsi (LP2KS) Solo dialihkan ke perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi (BGP KalTim di Samarinda)		
											8	Belanja perjalanan dinas untuk transportasi hanya diberikan kepada peserta yang berasal dari pesisir dan pedalaman (mendapat uang transport dan uang saku) Adapun peserta dari wilayah perkotaan hanya mendapatkan uang saku		
											9	Tidak dapat dibayarkan biaya PPG 2 orang guru Pendidikan Agama Islam yang mengundurkan diri a.n : 1. Isnaniah, S.Pd,I 2. Nurhasanah, S.Pd		
											10	Biaya 10 orang guru mata pelajaran /kelas dibiayai oleh Kemendikbud menggunakan dana APBN		
		15	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15	35329	Siswa	75.594.363.968,00	15	34.727.871.000,00	45,94	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan Anggaran Rp.75.594.363.968,00 dengan Total Serapan : Rp. 34.727.871.000,00 Pelaksanaan Kegiatan pada DPA Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar tetap terlaksana tuntas tetapi ada belanja yang tidak terserap dananya tapi tetap berjalan kegiatan, adapun permasalahannya adalah : Adapun solusinya adalah sebagai berikut :			
											1	Masih ada beberapa sekolah dalam proses penyelesaian laporan SP3B	1	Untuk kedepannya dari sekolah agar cepat penyampain laporan dan juga perlu dilaksankan BIMTEK pada sekolah untuk pelaporan Keuangan BOS
		16	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	16	12	Bulan	457.500.000,00	16	367.023.260,00	80,22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Anggaran : Rp.457.500.000,00 dengan rician : Belanja Pegawai Rp. 41.760.000,00, Barang dan Jasa :Rp. 415.740.000,00, Total Serapan : Rp. 367.023.250,00 Pelaksanaan Kegiatan pada DPA Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar tetap terlaksana tuntas tetapi ada belanja yang tidak terserap dananya tapi tetap berjalan kegiatan, adapun permasalahannya adalah : Adapun solusinya adalah sebagai berikut :			

											1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monev BOSDA tidak dapat terserap semua dikarenakan pelaksanaannya dilaksanakan pada akhir tahun dan Dana BOSDA baru cair pada Triwulan IV oleh karena itu tidak bisa maksimal terserap.	1	Semoga di Tahun 2023 dana bisa cair sesuai dengan triwulan yang sudah ditetapkan		
		2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2	100	%	85.448.323.379,00	2	60.030.256.602,00	89,02						
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1	1	Sekolah	4.192.004.380,00	1	3.693.080.700,00	88,10						
		2	Penambahan Ruang Kelas Baru	2	8	Sekolah	2.199.990.157,00	2	1.903.278.670,00	86,51						
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3	10	Unit	869.993.460,00	3	859.371.800,00	98,78						
		4	Pembangunan Asrama Sekolah	4	2	Unit	84.736.000,00	4	83.708.000,00	98,79						
		5	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	5	3	Sekolah	1.876.511.470,00	5	1.757.759.000,00	93,67						
		6	Pembangunan Fasilitas Parkir	6	5	Sekolah	479.997.020,00	6	471.834.000,00	98,30						
		7	Pembangunan Kantin Sekolah	7	10	Sekolah	719.990.580,00	7	713.966.000,00	99,16						
		8	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8	10	Sekolah	10.154.647.329,00	8	9.324.478.200,00	91,82						
		9	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	9	6	Sekolah	284.998.000,00	9	208.671.000,00	73,22						
		10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	10	4	Sekolah	3.477.039.600,00	10	3.274.560.600,00	94,18						
		11	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	11	4	Sekolah	100.000.000,00	11	84.532.000,00	84,53						
		12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	12	1	Sekolah	24.994.000,00	12	22.920.000,00	91,70						
		13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	13	5	Sekolah	124.995.000,00	13	72.438.000,00	57,95						
		14	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	14	3	Sekolah	399.895.120,00	14	377.581.000,00	94,42						
		15	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	15	3	Sekolah	719.993.940,00	15	716.536.000,00	99,52						
		16	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana , Prasarana Dan Utilitas Sekolah	16	2	Sekolah	479.996.520,00	16	472.458.000,00	98,43						
		17	Pengadaan Mebel Sekolah	17	7	Sekolah	11.273.632.000,00	17	9.409.116.740,00	83,46						
		18	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	18	47	Sekolah	4.804.414.100,00	18	4.639.888.620,00	96,58						
		19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	19	1000	Siswa	2.100.000.000,00	19	2.071.217.500,00	98,63						
		20	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	20	3	Sekolah	1.239.582.900,00	20	1.222.646.400,00	98,63						
		21	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	21	56	Sekolah	410.920.000,00	21	311.668.227,00	75,85						
		22	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	22	56	Sekolah	86.700.000,00	22	83.412.500,00	96,21						
		23	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	23	100	Siswa	109.360.000,00	23	84.551.215,00	77,31						
		24	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	24	671	Orang	566.380.000,00	24	518.309.860,00	91,51		1	Belanja kegiatan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMP sebesar Rp. 566.380.000,00 berjalan sesuai target dan anggaran terserap 100%, namun dalam hal ini ada kendala atau permasalahannya sebagai berikut :	1	Adapun solusinya adalah sebagai berikut :	
												1	Pihak dari narasumber terkadang mengalami jadwal perubahan dari jadwal yang telah ditentukan, sehingga tim yang bekerja harus mengubah jadwal yang telah direncanakan	1	Melakukan koordinasi secara efektif dengan pihak-pihak terkait dalam kegiatan ini	
		25	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	25	1	Sekolah	136.700.000,00	25	124.169.500,00	90,83			1	Belanja kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah sebesar Rp. 136.700.000,00 berjalan sesuai target dan anggaran terserap 100%, namun ada beberapa kendala atau permasalahan sebagai berikut :	1	Adapun solusinya adalah sebagai berikut :

										1	Terbatasnya tenaga pengawas dalam melakukan pembinaan kesekolah-sekolah binaan sehingga dalam hal ini memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga kegiatan berakhir diakhir tahun	1	perlu adanya penambahan tenaga fungsional khususnya pengawas sekolah bidang SMP
										2	Letak geografis sekolah yang akan dibina diperlukan waktu yang cukup lama dengan sarana pendukung transportasi yang masih minim	2	Menambah tenaga staf untuk membantu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan
		26	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	26	14681	Siswa	38.505.351.803,00	26	17.502.603.070,00	45,45	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan Anggaran Rp.38.505.351.803,00 dengan Total Serapan : Rp. 17.502.603.070,00 Pelaksanaan Kegiatan pada DPA Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama tetap terlaksana tuntas tetapi ada belanja yang tidak terserap dananya tapi tetap berjalan kegiatan, adapun permasalahannya adalah :	Adapun solusinya adalah sebagai berikut :	
										1	Masih ada beberapa sekolah dalam proses penyelesaian laporan SP3B	1	Untuk kedepannya dari sekolah agar cepat penyampain laporan dan juga perlu dilaksanakan BIMTEK pada sekolah untuk pelaporan Keuangan BOS
		27	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	27	12	Bulan	25.500.000,00	27	25.500.000,00	100,00			
		3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3	100	%	16.788.051.117,00	3	9.797.248.939,00	84,73			
		1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1	2	Sekolah	2.453.846.467,00	1	2.238.595.356,00	91,23			
		2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2	6	Sekolah	650.000.000,00	2	637.617.850,00	98,10			
		3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3	2	Sekolah	419.999.750,00	3	417.786.000,00	99,47			
		4	Pengadaan Mebel PAUD	4	4	Sekolah	150.000.000,00	4	116.760.000,00	77,84			
		5	Pengadaan Perlengkapan PAUD	5	15	Sekolah	670.000.000,00	5	654.737.100,00	97,72			
		6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	6	15	Sekolah	379.265.000,00	6	368.236.500,00	97,09			
		7	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	7	480	Orang/Tahun	4.515.000.000,00	7	4.297.208.813,00	95,18			
		8	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	8	138	Sekolah	99.999.700,00	8	99.949.700,00	99,95			
		9	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	9	150	Orang/Peserta	490.220.200,00	9	451.751.420,00	92,15			
		10	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	10	50	Sekolah/Lembaga	579.920.000,00	10	446.328.400,00	76,96	Dalam rangka kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 579.920.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 447.998.400,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 131.921.600,00 adapun permasalahannya adalah :	Adapun solusinya adalah sebagai berikut :	
										1	Dalam pelaksanaan kegiatan murni dan ABT sehingga tidak terlaksana disebabkan karena waktu pelaksanaan yang tidak cukup atau kurang	1	Kegiatan pada anggaran Tambahan (ABT) akan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan mengingat waktu sangat singkat dan beberapa kegiatan yang harus diselenggarakan menyesuaikan kegiatan , dana dan pengelolaan anggaran

		11	Pengelolaan Dana BOP PAUD	11	230 Siswa	6.304.800.000,00	11	0,00	0,00	Dalam kegiatan pengelolaan dana BOP PAUD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.304.800.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.392.594.555,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.912.205.445,00 adapun permasalahannya adalah :	Adapun solusinya adalah sebagai berikut :
										1 Dana yang disalurkan tidak melalui keuangan dinas pendidikan, melainkan transfer langsung dari pusat sehingga tidak terdeteksi dalam pengelolaan keuangan dinas pendidikan	1 Dalam ha ini manajemen keuangan dinas pendidikan perlu juga adanya sistem pelaporan yang terhubung satu sama lain
										2 Masih kurangnya SDM khususnya pengelola BOP pada satuan pendidikan usia dini (PAUD)	2 Perlu dilakukan bimtek pengelolaan keuangan dan sistem pelaporan BOP PAUD secara berkala
		12	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	12	12 Bulan	75.000.000,00	12	68.277.800,00	91,04		
		4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4	100 %	2.737.907.088,00	4	2.448.462.035,00	72,10		
		1	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	1	8 PKBM	200.000.000,00	1	155.576.400,00	77,79	Dalam kegiatan proses belajar non formal/kesetaraan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 155.576.400,00 dan dengan sisa anggaran sebesar Rp. 44.423.600,00, adapun permasalahannya adalah :	Adapun solusinya adalah sebagai berikut :
										1 kurangnya manajemen waktu yang tidak tepat pada saat pelaksanaan kegiatan	1 Untuk pelaksanaan kedepannya perlu efektifitas dan proses perencanaan yang lebih matang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan proses belajar non formal/kesetaraan.
		2	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2	8 PKBM	75.000.000,00	2	72.480.600,00	96,64		
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3	110 Orang	349.999.600,00	3	217.311.525,00	62,09	Dalam kegiatan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal/kesetaraan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 349.999.600,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 217.328.025,00 dengan sisa anggaran Rp. 132.671.575,00, adapun permasalahannya adalah :	Adapun solusinya adalah sebagai berikut :
										1 dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di dalam kota maka biaya perjalanan dinas dalam kota tidak tepat sasaran sesuai biaya bimtek yang dilaksanakan pada program paket A, B dan C melebihi anggaran	1 Dalam penganggaran ditahun berikutnya agar lebih menyesuaikan perencanaan anggaran dengan kegiatan bimtek yang sesuai sehingga dana dapat terserap dengan maksimal
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4	1 SPNF	569.307.488,00	4	547.038.510,00	96,09		
		5	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5	8 PKBM	1.538.600.000,00	5	1.451.055.000,00	94,31	Dalam kegiatan pengelolaan Dana BOP sekolah Non Formal/Kesetaraan telah di salurkan dana sebesar Rp. 1.451.960.000,00 dengan dana yang terserap sebesar Rp. 1.451.055.000,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 904.600.000,00, permasalahannya adalah :	Adapun solusinya adalah sebagai berikut :
										1 Dana yang disalurkan tidak melalui keuangan dinas pendidikan, melainkan transfer langsung dari pusat sehingga tidak terdeteksi dalam pengelolaan keuangan dinas pendidikan	1 Dalam ha ini manajemen keuangan dinas pendidikan perlu juga adanya sistem pelaporan yang terhubung satu sama lain
										2 Masih kurangnya SDM khususnya pengelola BOP pada satuan pendidikan non formal	2 Perlu dilakukan bimtek pengelolaan keuangan dan sistem pelaporan BOP Kesetaraan secara berkala

		6	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6	12	PKBM	5.000.000,00	6	5.000.000,00	100				
		3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3			4.384.353.200,00	3	4.277.511.700,00	92,34				
		1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	100	%	4.384.353.200,00	1	4.277.511.700,00	92,34				
		1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	4	Laporan	4.327.981.200,00	1	4.228.480.900,00	97,70				
		2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2	13	Kec	56.372.000,00	2	49.030.800,00	86,98				
		JUMLAH						618.093.979.111,00		492.631.069.414,00	86,86			